



**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KABUPATEN JOMBANG**

(Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)

***THE ROLE OF SOCIAL COMPANION FAMILY PROGRAM (PKH) OF
JOMBANG DISTRICT***

(Descriptive Study On The Service Of The East Java Province of Jombang)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

Oktiano Regian Zufri

NIM. 070910301133

Dosen Pembimbing :

Dra. Wahyuningsih, M.Si

NIP. 19540224 198503 1 001

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, saya persembahkan karya ini sebagai bentuk hormat dan ungkapan kasih sayang dan cinta saya kepada :

- ↳ Kedua orang tuaku, Alm. Achmad Zulfa dan Choiriyah Kasbi yang tiada henti mengucapkan serangkaian doa dan dukungan terbaik dengan ketulusan hati untuk keberhasilan dan kesuksesanku;
- ↳ Kedua kakakku, Priliana Aispa Ulfari dan Oktiano Espi Zulfiriansyah SH., yang tiada henti menasehati dan memberikan motivasi dengan ketulusan hati demi keberhasilanku;
- ↳ Sahabat-sahabatku KS '07 terima kasih telah memberikan support, motivasi dan do'a;
- ↳ Almamater tercinta UNIVERSITAS JEMBER, jayalah engkau selalu.

MOTTO

“Beradab itu tidak dinilai dari seberapa kacaunya penampilan, melainkan dari kepedulian”
(Homeless Crew)**)

“Jangan kau penjarakan ucapanmu jika kau menghamba pada ketakutan, karena kita akan memperpanjang barisan perbudakan”
(Wiji Thukul)**)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktiano Regian Zufri

NIM : 070910301133

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 November 2014
Yang menyatakan

Oktiano Regian Zufri
070910301133

SKRIPSI

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KABUPATEN JOMBANG**

(Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)

***THE ROLE OF SOCIAL COMPANION FAMILY PROGRAM (PKH) OF
JOMBANG DISTRICT***

(Descriptive Study On The Service Of The East Java Province of Jombang)

oleh

Oktiano Regian Zufri

NIM. 070910301133

Dosen Pembimbing :

Dra. Wahyuningsih, M.Si

NIP. 19540224 198503 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (*Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur*)” telah diuji dan disahkan pada:

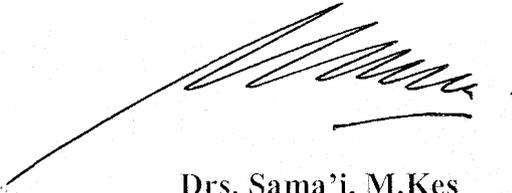
Hari, tanggal : Rabu, 24 Desember 2014

Tempat : Ruang Sidang Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Sama'i, M.Kes
NIP. 195711241987021001



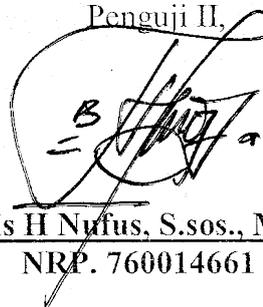
Dra. Wahyuningsih, M.Si
NIP. 195402241985031001

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A
NIP. 1958060919855032003



Belgis H Nufus, S.sos., M.Kesos
NRP. 760014661

Mengesahkan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.
NIP. 195207271981031003

PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Skripsi ini memilih judul: **Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)**. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun usaha untuk menyempurnakan sudah kami lakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Nur Dyah Gianawati, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Drs. Partono M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Ibu Dra. Wahyuningsih, M.Si, sebagai pembimbing dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, terima kasih atas motivasi dan bimbingan yang telah diberikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan selama penulis duduk di bangku kuliah;
6. Segenap dosen dan asisten dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Drs. Ahmada, M.si, selaku Kepala DINSOSNAKERTRANS yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor UPPKH;
8. M. Fatoni Safriansyah, SH, selaku koordinator pendamping PKH wilayah Kabupaten Jombang yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada penulis mengenai kegiatan dan peran pendamping PKH, dan seluruh peserta PKH (KSM) yang memberikan informasi;
9. Kawan-kawan seprofesi dan seperjuangan, Hendrik "Nyet", Cekod, Bobby, Setyo "Karwo", Njack, Edhi Jesus, saudara-saudaraku Homeless Crew, Mucikari (Komunitas Pecinta Kartu Ceki), Chacha Tatto, Depok, Kipli, Samid, Dandot, Ucok, Husain, Rendy Minyak, Putu Keplug, Yusaf, Green Malikha, dua adik kesayanganku Banun dan Devi, serta kamu "SP" yang selalu memenuhi hati dan pikirku;
10. Kawan-kawan seperjuangan di Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2007 dan 2010, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca. Amien.

Jember, 26 November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial.....	8
2.2 Teori dan Konsep Kemiskinan Absolute.....	10
2.3 Konsep Peran Pekerja Sosial (Pendamping).....	11
2.3.1 Konsep Peran.....	11
2.3.2 Konsep Pekerja Sosial (Pendamping).....	13
2.3.3 Pekerja Sosial Dalam Pendampingan.....	16
2.4 Konsep Pemberdayaan.....	19
2.5 Alur Pikir Penelitian.....	21
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Jenis Penelitian.....	25
3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian.....	25
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	26
3.4.1 Informan Pokok (<i>Primary Informan</i>).....	27
3.4.2 Informan Tambahan (<i>Secondary Informan</i>).....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5.1 Observasi Partisipatif.....	29
3.5.2 Wawancara.....	30
3.5.3 Dokumentasi.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
BAB 4. PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH).....	36
4.1.1 Tujuan PKH.....	38
4.1.2 Sasaran PKH.....	38
4.1.3 Kerangka Kelembagaan Pusat Dan Fungsinya.....	40
4.1.4 Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Pada Tingkat Kabupaten Jombang	46

4.2 Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan Oleh Suku Dinas Kabupaten Jombang	48
4.2.1 Beberapa peran yang harus dilakukan pendamping PKH	50
4.2.2 Kendala atau Hambatan Pendamping Dalam Program PKH ...	63
4.2.3 Solusi Dari Kendala Pendamping Dalam Program PKH	65
BAB 5. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.2 Perbandingan IPM Kabupaten Jombang	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Alur Pikir Penelitian	21
4.1 Hubungan Pendamping UPPKH dan Peserta PKH	47
4.2 Kerangka Pikir Program Monitoring dan Evaluasi PKH	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Reduksi
- Lampiran 3. Surat ijin dari Lembaga Penelitian Universitas Jember kepada DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Jombang.

RINGKASAN

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur); Oktiano Regian Zufri; 070910301133; 2014; 73 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Indonesia adalah negara berkembang diantara negara-negara Asia lain pada umumnya. Krisis multidimensi menjadikan Indonesia berpotensi menetas berbagai masalah patologi sosial, dinamika, dan problem sosial lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal ini, UPPKH sebagai unit pengelola PKH yang dibentuk baik dari pusat dan daerah merekrut pendamping PKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan KSM (Keluarga Sangat Miskin) yang berperan sangat penting dalam sistem perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Di Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun terjadi penambahan Rumah Tangga Miskin (RTM). Angka penambahan kemiskinan dapat berkurang dengan adanya Program PKH tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya peran dari para pendamping PKH. Dari adanya hal-hal tersebut, penulis memberikan batasan pada karya tulis ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam interpretasinya dan membatasi pembahasan pada “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Di Kabupaten Jombang Jawa Timur”.

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengentasan kemiskinan melalui Program PKH, untuk mengetahui harapan peserta PKH dalam program perlindungan sosial dengan adanya pendampingan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan informan, penulis menggunakan teknik purposive karena metode tersebut dirasa lebih mudah untuk menentukan kriteria informan. Dan dalam penelitian ini, penulis menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sementara pembagian informan yang dipilih berdasarkan fungsinya, yakni : informan pokok merupakan orang yang memahami betul tentang apa itu PKH, visi dan misi PKH, manfaat dan tujuan, telah masuk dalam sekretariat UPPKH Kabupaten, dan peneliti menetapkan pendamping PKH sebagai informan pokok. Sedangkan informan tambahan, peneliti menetapkan sedikit dari sebagian masyarakat peserta PKH yang mendapatkan bantuan sosial. Penulis menetapkan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagai sample lokasi penelitian dikarenakan Kecamatan Kabuh tersebut merupakan daerah yang rentan akan kemiskinan dan terdapat kesenjangan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ditandai dari masalah utama dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Pengujian kevalidan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan memadukan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah peran pendamping PKH merupakan seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan hidup secara mandiri. Harapan dari masyarakat agar selalu berinteraksi, melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja sehingga anggota masyarakat mampu membangun hidup mereka serta keluarganya secara layak. Kesulitan bagi pendamping adalah pengumpulan berkas formulir pemutakhiran dan juga adanya peserta yang menyalahgunakan kartu bantuan program PKH. Keberfungsian sosial menjadi strategi dan solusi dalam penanganan kemiskinan, intervensi pendamping senantiasa melihat sasaran perubahan dengan situasi yang dihadapi serta pentingnya peranan Pemerintah Daerah juga menjadi ukuran keberhasilan program PKH

BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang diantara negara-negara Asia lain pada umumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang telah lebih dulu menggapai kemajuan (modern), maka negara-negara Asia adalah negara yang bagian lain yang identik dengan kemiskinan. Berbagai krisis yang melanda negara Asia Tenggara sejak tahun 1990-an hingga tahun 2000-an kawasan negara Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand) mengalami krisis yang multidimensional. Sebagai negara besar, Indonesia tidak terlepas dengan berbagai krisis yang melanda di hampir seluruh Asia khususnya Asia Tenggara. Menjadi sulit bagi Indonesia untuk bergerak ke peradaban yang lebih maju (modern), dalam arti mampu mensejahterahkan negara, bangsa dan rakyatnya. Krisis *multidimensi* menjadikan Indonesia berpotensi menetasakan berbagai masalah patologi sosial, dinamika dan problem sosial seperti misalnya gesekan antar etnis, kemiskinan, kebodohan, kejahatan, kelaparan, dan tidak sehatnya dinamika kepemimpinan Indonesia (politik). Dengan berbagai problem dan konflik sosial tersebut, Indonesia seakan sulit melepaskan diri dari lobang hitam tiada celah tanpa solusi untuk perbaikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ekonomi negara menjadi lika-liku tak berwujud pada hal-hal yang kongkrit dan spesifik, hingga akhirnya sosial dan agama menjadi arena pembenaran dalam melakukan kerusakan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, kemiskinan dan kebodohan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan, contohnya seperti keterbelakangan, ketelantaran, problema buta huruf, anak putus sekolah, pekerja anak, dan juga seseorang dapat dikatakan miskin misalnya, berpendapatan rendah, memiliki rumah yang tidak layak huni, serta pemenuhan kebutuhan pokok yang masih belum tercukupi.

(Praktek Pekerjaan Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat, Jilid 1 : 2)

Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia satu negara yang hendak mencari berbagai solusi yang pasti untuk kehidupan yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhannya. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik dan budaya, kemiskinan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, sejarah, kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta dalam hubungan bilateral dan diplomasi. Dalam proses pembangunan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu yang pertama dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan suatu masyarakat, sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi mikro yaitu individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri, (Adi, 2003 : 1).

Menurut Syaiful Arif , kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural diakibatkan dari adanya karakter budaya dan etos kerja yang lemah pada masyarakat, sedangkan kemiskinan struktural bisa terjadi karena adanya struktur dan kebijakan pemerintah yang mengalami ketimpangan, sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada konsep mengenai kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Yang pertama melihat budaya kemiskinan seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta sebagai penyebab seseorang miskin. Yang kedua

menilai bahwa struktur sosial yang tidak adil, korup, merasa rendah diri yang sudah mengakar sebagai penyebab kemiskinan. (2003)

Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, dalam membangun masyarakat Indonesia untuk menggapai kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam sebuah negara, masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain masyarakat sebagai individu atau kelompok secara langsung memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang terarah untuk mempengaruhi perubahan sosial tersebut.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 37,7 juta atau 16,58% dari total penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Diharapkan angka kemiskinan pada akhir 2009 dapat diturunkan 18,8 juta atau 8,2% dari total penduduk. Dari data tersebut, Indonesia telah mengeluarkan berbagai program untuk memberantas kemiskinan yang telah berurat-akar di Indonesia. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengentasan Kemiskinan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dll) telah menjadi momok yang seakan tidak tepat sasaran bagi rakyat.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program subsidi langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis.

(Pedoman Umum PKH Lintas Kementerian Dan Lembaga, Pedoman Umum PKH, 2008)

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk Tahun 2010 (PKIB Tahun 2010), jumlah rumah tangga di Kabupaten Jombang sebanyak 279.876 rumah tangga, dan jumlah penduduk sebesar 1.201.557 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 93.425 rumah tangga atau sama dengan 33,38%, dan jumlah penduduk miskin sebesar 320.821 jiwa atau sekitar 28,06%. Pada tahun 2009, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 27,85%, ternyata pada tahun 2010 Rumah Tangga Miskin (RTM) bertambah menjadi 33,38% dari total penduduk. Ini berarti selama waktu satu tahun telah terjadi pertambahan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 5,53%. Atau dengan kata lain rata-rata perkembangan atau pertambahan Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 5,53%. Dengan adanya program PKH, pemerintah dapat dengan mudah melakukan percepatan dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Jombang. *(Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru Jawa Timur 2009 dan 2010)*

PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Bagi para peserta PKH program ini diharapkan dapat membantu peningkatan ke taraf hidup yang lebih baik dalam hal pendidikan dan kesehatan, sedangkan bagi pemerintah program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu

pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

(Sumber : <http://fasilitator-masyarakat.org/index-artikel>; *Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan*)

Dengan PKH diharapkan KSM (Keluarga Sangat Miskin) penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan social yang selama ini melekat pada diri warga miskin. Secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi, hal ini disebabkan tidak adanya kehadiran tenaga medis pada kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan tindakan, atau masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga kesehatan tradisional daripada tenaga medis lainnya. (Pedoman Umum PKH, 2009 : 4)

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak. Gizi yang kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Bagi anak kondisi kesehatan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Akibat dari kesehatan yang buruk membuat anak sering tidak masuk sekolah karena sakit dan dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah. Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SLTP / sederajat. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. (Pedoman Umum PKH, 2009 : 5)

Dari berbagai masalah tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, terutama bagi KSM perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin. Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan system perlindungan social, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan KSM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, yang akan membawa perubahan perilaku KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku tersebut juga diharapkan akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah KSM yang bekerja. Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem persekolahan harus ditingkatkan. Sebagian besar dari mereka yang pada usia sekolah tidak berada dalam system persekolahan biasanya

mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar. (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial RI, 2009)

Menurut Kabid. Bantuan Sosial dan Rehabilitasi DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Jombang, dalam hal ini UPPKH sebagai unit pengelola PKH yang dibentuk baik di pusat dan daerah merekrut pendamping PKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan KSM penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH. PKH Kabupaten Jombang pernah mendapatkan penghargaan menjadi PKH terbaik se-Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran pendamping PKH sangat penting dalam sistem perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pendamping PKH, terutama untuk daerah yang diduga banyak terdapat pekerja anak akan dibekali dengan pengetahuan berkaitan dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka kembali ke bangku sekolah. Dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi *supply* dan *demand side*, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal.

Berbagai problematika sosial dalam sistem perlindungan sosial dan percepatan kemiskinan ini memberikan pertanyaan yang mendasar, mengenai peran pendamping PKH pada proses pemberdayaan masyarakat miskin, dalam sebuah permasalahan sosial. Kemiskinan Indonesia akan bergantung peran dan fungsi pendamping dari berbagai program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mendefinisikan standar kehidupan yang normal (layak) bagi keseharian masyarakat. Menjadi kewajiban bersama bagi setiap komponen pemerintah dan masyarakat dalam bernegara untuk bersama-sama menyelami kemiskinan, sehingga peran dan fungsi masing-masing sebagai satu cara untuk keluar dari kebodohan dan kemiskinan.

1. 2 Perumusan Masalah

Agar penulisan karya tulis ini menjadi terarah dan tidak meluas kepada pembahasan lainnya, maka penulis merumuskan masalah ini sebagai berikut :

“Bagaimana peran para Pendamping PKH dan harapan peserta PKH melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?”

1. 3 Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis studi ini dapat menambah cakrawala pengetahuan bahwasannya permasalahan masyarakat miskin sangatlah beragam dan bermacam-macam dalam penanganannya.

Secara praktis kita dapat mengetahui dan merasakan akan segala permasalahan masyarakat miskin selama ini, dengan adanya penelitian ini semata-mata menjadikan tugas bagi para pengembang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat miskin, sebagai fasilitator dan mediator

bagi harapan akan keberdayaan masyarakat miskin, dan diharapkan mampu memberikan masukan bagi Instansi-instansi lain mengenai potensi-potensi dan masalah-masalah yang ada dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Khususnya lembaga-lembaga (seperti : DEPSOS, UPPKH Pusat dan UPPKH Kabupaten Kota) yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat miskin. Serta sebagai acuan pemerintah dalam membuat program-program pelayanan bagi masyarakat miskin.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mendeskripsikan suatu realitas sosial diperlukan landasan yang sangat luas berupa konsep-konsep atau teori-teori mengenai fakta yang menjadi obyek dari penelitian. Hal itu dilakukan guna memberikan jawaban terkait dengan rumusan masalah. Bila tanpa landasan teori yang kuat maka akan mengakibatkan adanya kekaburan dalam kegiatan pengumpulan data-data di lapangan, tinjauan pustaka selalu berpegang dan berpusat pada konsep atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan teori atau konsep-konsep dasar yang dapat dijadikan acuan atau pegangan terhadap suatu penelitian untuk menjelaskan hal tersebut.

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah lama mengenal istilah kesejahteraan dan terus mengalami amandemen hingga sekarang. Kesejahteraan sosial dijelaskan dalam Undang-undang Kesejahteraan sosial nomor 11 tahun 2009 pasal 1 yang berbunyi “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Hal tersebut dinyatakan pula oleh pemerintah dan DPR RI (dalam Suud, 2006:4-5) yang mendefinisikan:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat menunjang tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.”

Dalam pengertian yang lebih luas, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. Suharto (2005:1) menyatakan bahwa:

“PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.”

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Menurut Suharto (2005:2) kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
- b. Instistusi, area atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar. Dalam teori Abraham Maslow (1984:25) tentang kebutuhan dasar manusia (*basic need*), menyatakan bahwa manusia memiliki lima kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial sendiri menurut Midgley dalam Adi (2004:7) adalah “*a state or condition of human well-being that exist when social problem are managed, when human needs are met, and when social opportunities are mazimized*”. (Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika (1) masalah-masalah sosial yang ada dapat ditangani, (2) kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, dan (3) kesempatan-kesempatan sosial dapat dimaksimalkan). Terlihat pada definisi diatas setiap masalah yang memungkinkan untuk menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia (baik itu berupa masalah sosial, kebutuhan yang harus dipenuhi, atau kesempatan sosial yang ada), baik secara perorangan ataupun dalam masyarakat yang lebih luas, adalah bagian dari penanganan masalah kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kondisi *well-being* yang optimal.

2. 2 Teori dan Konsep Kemiskinan Absolute

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan sebagai standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tolak ukur umum yang digunakan adalah tingkat pendapatan per waktu kerja, kebutuhan relatif per keluarga termasuk untuk sandang, pangan, papan.

Menurut Sunyoto (1998:126) Konsep kemiskinan absolute dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret. Ukuran itu lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan, papan). Masing-masing Negara mempunyai batasan kemiskinan absolute yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan. Artinya bahwa kemiskinan tersebut dilihat dari kondisi dimana masyarakat itu berada. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan, pemerintah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu:

1. Mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan
2. Melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan kesemua daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.

2. 3 Konsep Peran, Pekerja Sosial (Pendamping)

2. 3. 1 Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup 3 hal :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Tinjauan Sosiologis Tentang Peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain.

Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Peranan diatur dalam norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki berjalan, harus berada dari sebuah luar. (Soerjono, S. 2003)

Secara sosiologis peran pendamping adalah sebagai pembangun, yang dijalankan berdasarkan atas prinsip demokrasi, akan selalu berorientasi kepada proses dimana seluruh lapisan masyarakat akan turut serta dalam pembangunan, baik dalam kepeloporan, maupun pada keprakarsaan, sehingga kebutuhan terasa maupun kebutuhan nyata masyarakat terakomodasi dalam pembangunan.

Berbicara masalah pembangunan adalah berbicara suatu pandangan yang lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata pembangunan itu sendiri adalah *discourse*, suatu pendirian, atau suatu paham bahkan merupakan suatu ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Dalam pandangan ini, konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersikap netral, melainkan suatu keyakinan aliran ideologis dan teoritis serta praktik mengenai perubahan sosial (Fakih, 2001). Dengan demikian, pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan sosial. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat juga teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, depedensi, ataupun teori lainnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih mengacu pada pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal ini pembangunan industri padat modal (*capital intensive*) yang diharapkan menjadi jalan pintas untuk mencapai kemakmuran

dan mengantarkan masyarakat ke era modernisasi. Demikian pentingnya paradigma tersebut, menyebabkan pembangunan ekonomi seolah-olah menjadi lembaga otonom yang memiliki kekuatan untuk menyingkirkan faktor-faktor non ekonomi yang dianggap menjadi penghambat pembangunan. Dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proses *trickle down effect*, justru tidak terjadi. Bahkan kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin semakin melebar. Sebagai akibatnya, masyarakat semakin terpuruk dalam situasi dan kondisi ketidakadilan.

Pembangunan seharusnya merupakan suatu mobilitas sumberdaya manusia dan sosial secara internal memiliki dasar-dasar yang kuat, dijunjung tinggi dan telah memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tanpa mengintegrasikan faktor-faktor non ekonomi dalam pembangunan, akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah, karena selayaknya pembangunan harus dilakukan dengan berbasis pada masyarakat atau suatu pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. (Syamsiah, 2009)

2. 3. 2 Pekerja Sosial (Pendamping)

Dilihat dari susunan katanya bahwa istilah Pendamping terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu : Pen “*pe*” dan “*damping*”. Suku kata Pen “*pe*” mengartikan individu, orang yang sedang melakukan pekerjaan atau aktifitas tertentu. Suku kata “*damping*” mempunyai arti Samping atau Sisi terdekat, Mitra, Setara, Teman. Maka dapat diterangkan bahwa Pendamping adalah “Individu atau seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.”

(*Sumber*: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?.pg=artikel_detail&id=190)

Pendamping dalam bahasa Inggris *colleague*, juga bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar. Realita dalam masyarakat penggunaan istilah Pendamping lebih populer dan mudah dimengerti, tetapi makna yang terkandung belum tentu dipahami oleh semua orang. Pendampingan Sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.

Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan masyarakat disamping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama kolektif. Karena itu diperlukan penguatan modal sosial dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Saat ini di Indonesia telah berkembang satu sistem pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana

(pelaku) dengan nama pendamping sosial untuk melengkapi pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada.

Proses sejarah lahirnya dan perkembangan dari lembaga swadaya masyarakat di bumi ini sebagian besar inisiatornya adalah Pendamping dari luar komunitas dampingan yang bertugas dan berfungsi melakukan aksi kebudayaan dan upaya menemani rakyat atau komunitas melalui proses transformasi sosial menuju cita-cita yang diharapkan bersama.

Metode pendampingan diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan dalam kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok dan fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), maupun sebagai dinamisator (penggerak). (Zubaedi, 2007)

Pekerjaan sosial pendampingan di dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai :

1. Seni, pekerjaan sosial sebagai seni memerlukan keterampilan dalam praktek untuk memahami manusia dan membantu agar mempunyai kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri. Yang diperlukan dalam hal ini adalah keterampilan dalam pemahaman dan identifikasi masalah, mengadakan diagnosis, dan melakukan evaluasi, serta memberikan terapi-terapi tertentu. Untuk melakukan hal ini, pendamping memerlukan ilmu pengetahuan yang memadai tentang pribadi, tingkah laku manusia, kondisi dan lingkungan sosial di mana manusia hidup.
2. Sebagai ilmu, pekerjaan sosial sebagai ilmu memerlukan seperangkat ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya yang relevan dalam upaya pemecahan masalah. Dalam hal ini, pemahaman masalah dan penggunaan metode pemecahan masalah dilaksanakan secara objektif berdasarkan prinsip ilmu pengetahuan, sehingga mampu memahami fakta-fakta dari setiap permasalahan, dan dapat pula digunakan untuk mengembangkan prinsip maupun konsep dalam praktek pekerjaan sosial. Dengan demikian pekerja sosial (pendamping) menggunakan ilmu pengetahuan dan seni dalam arti ia menggunakan metode-metode ilmiah dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.
3. Sebagai profesi, pekerjaan sosial sebagai profesi harus memiliki nilai-nilai dan kode etik karena pekerjaan sosial bukan hanya perlu syarat-syarat profesi, akan tetapi yang lebih adalah pekerja sosial memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, terutama untuk mencapai tujuan sosial.

Sebagai satu profesi, pekerjaan sosial memiliki karakteristik tertentu, yang membedakan pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Dunham menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik dari profesi pekerja sosial, yaitu :

- 1) Pekerjaan sosial merupakan kegiatan pemberian bantuan (*helping profession*)
- 2) Dalam ranah sosial, pekerjaan sosial makna bahwa kegiatan pekerjaan sosial adalah kegiatan *non profit* dalam artian bahwa profesi ini lebih mementingkan *service* (dalam arti luas) dibandingkan sekedar mencari keuntungan (*profit*) saja.
- 3) Kegiatan perantara (rujukan) agar warga masyarakat dapat memanfaatkan semua sumber daya yang terdapat dalam masyarakat.

Pekerjaan sosial atau pendampingan merupakan profesi pertolongan yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna mencapai

tingkat kesejahteraan sosial, mental, dan psikis yang sebaik-baiknya. (Adi, I. R., 2003)

2. 3. 3 Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan

Penguatan modal sosial dapat dilakukan melalui pendidikan agama, sosialisasi keluarga, teladan pemimpin, pemeliharaan dan institusi sosial, sosialisasi dan internalisasi pentingnya modal sosial, pengembangan komunikasi informasi, dan mengakomodasi informasi melalui proses penyaringan kemanfaatannya. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat membutuhkan pendamping yang berfungsi sebagai seorang yang menganalisa permasalahan, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, penggerak, dan penghubung. Prinsip bekerjanya adalah kerja kelompok, keberlanjutan, keswadayaan, kesatuan khalayak sasaran, penumbuhan saling percaya, prinsip pembelajaran bersinambung, dan pertimbangan keragaman potensi khalayak sasaran

Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Barker (1987), memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi atas kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan mencolok dan mengarah pada konflik antar berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien memenuhkannya sendiri.

5. Pembela

Dalam prakteknya, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memerankan peranan sebagai pembela. Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus, dan pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

6. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Adapun demikian, prinsip-prinsip peran pelindung meliputi :

- a) Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama
- b) Menjamin bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan proses perlindungan
- c) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional dalam praktek pekerjaan sosial

Dalam proses pendampingan sosial, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial :

- a) Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesment kebutuhan masyarakat yang meliputi jenis dan tipe kebutuhan, distribusi kebutuhan, kebutuhan akan pelayanan, pola-pola penggunaan pelayanan, dan hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan.
- b) Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, mendefinisikan peran lembaga-lembaga, mendefinisikan potensi dan hambatan lembaga-lembaga, memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan setiap masalah sosial masyarakat, mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan,

dan mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial. (Edi Suharto Ph. D., 2009)

2. 4 Konsep Pemberdayaan

Menurut Suparjan (2003:36), secara prinsip pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan sebuah komunitas atau masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.

Sedangkan menurut Moebyarto (1985) dalam Adi (2008), pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses serta kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memenuhi mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Abdurrachman (2000:60) “bahwa masyarakat memahami kebutuhan dan permasalahan yang harus diberdayakan agar mereka mampu dalam mengenali kebutuhan-kebutuhannya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap, “*ajeg*” dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial dan merupakan hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama”.

Wiranto (1999), pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya.

Untuk mengelola sumber daya tersebut, menurut Tikson (2001), model pembangunan (*community development/CD*) merupakan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan. Dimana sasaran utama *community development* adalah menolong masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktifitas pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu:

- a. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan yang menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
- b. Mendapat akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
- c. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

2.5 Alur Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)”. Berawal dari fenomena bertambahnya Rumah Tangga Miskin setiap tahunnya. Menurut berbagai data yang telah disajikan pada Bab I, rata-rata perkembangan atau penambahan Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 5,53% dari total penduduk setiap tahun. Secara factual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya akar permasalahan yang terjadi baik dari sisi Keluarga Sangat Miskin (KSM), alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah dengan keterbatasan biaya. Demikian halnya untuk kesehatan, KSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya pendapatan.

PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin dengan memberikan peran pendampingan di masyarakat. Mewajibkan KSM memeriksakan kesehatan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, dengan tujuan agar membawa perubahan perilaku KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Dalam hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran para pendamping PKH yang memonitoring dan bertanggung jawab atas KSM yang didampinginya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya menemukan kebenaran atau lebih membenarkan. Penelitian pada umumnya adalah untuk menentukan suatu generalisasi dan menjelaskan fenomena yang meliputi permasalahan dalam penelitian. Untuk menjelaskan fenomena tersebut dalam penelitian maka dibutuhkanlah metode penelitian suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian memegang peranan yang penting karena dalam bab ini mengandung unsur metode pengumpulan data di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Menurut Singarimbun dan Efendi (dalam Sugiono 2004:18) bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu konsep atau gejala”. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) yang dikutip oleh Sugiyono (1997:23) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Implikasi dari penelitian ini adalah bertumpu pada pencarian data sebanyak-banyaknya. Data di lapangan dikumpulkan sejauh dianggap cukup, guna memberikan gambaran maksimal yang diinginkan untuk menentukan, membuktikan dan mengembangkan serta menjelaskan tentang suatu permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, terkait dengan tujuan penelitian bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan fokus penelitian karena berusaha menggambarkan fenomena sosial secara terperinci dari Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Penelitian deskriptif menurut Neuman (2006:35) “*Descriptive research present a picture of spesific details of situation, social setting or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject*” (penelitian deskriptif memberikan gambaran yang terperinci tentang suatu situasi sosial, setting sosial atau hubungan sosial. Hasil dari studi deskriptif adalah gambaran subjek secara detail)

Searah dengan pendapat tersebut, Bungin (2007:68) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu

kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif akan mendiskripsikan tentang Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur).

3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Hal yang paling utama dan mendasar dalam penelitian kualitatif adalah *setting* penelitian. Seperti dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Sugiyono: 1997:42), bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri. Penelitian ini langsung menunjukkan *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan, subyek penelitian berupa individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Sebagai sebuah penelitian, langkah awal yang harus dilakukan adalah penentuan wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dimaksudkan untuk memperjelas fokus penelitian atau permasalahan yang akan diteliti. Penulis menetapkan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagai salah satu lokasi penelitian dikarenakan daerah tersebut sangat rentan dalam masalah kemiskinan khususnya masalah pendidikan dan kesehatan, sehingga peserta PKH dari Kecamatan Kabuh merupakan peserta terbanyak jika dibandingkan dengan peserta PKH dari kecamatan lainnya di daerah Kabupaten Jombang.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut Moleong (2000 : 90) menyatakan bahwa : informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang obyek penelitian bagi peneliti.

Informan adalah orang yang mengetahui tentang suatu kejadian atau peristiwa di lapangan dan terlibat langsung dalam kejadian itu sehingga apabila penulis bertanya tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian maka penulis mendapatkan data yang valid. Informan disini nantinya sebagai obyek yang aktif memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan penulis. Sehingga dalam hal ini penulis berusaha menggali informasi lebih dalam dari informan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan informan dengan mempertimbangkan bahwa informan dapat dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya seperti pendapat Boydan dan Biklen dalam Moleong (2000 : 90). Dan untuk menentukan informan salah satunya dapat dilakukan melalui keterangan orang yang berwenang dan dipandang paling banyak mengetahui terhadap masalah yang dikaji, baik secara formal maupun informal. Sehingga dalam penentuan informan penulis menggunakan teknik *Purposive*, menurut Sugiono (2004 : 52) yaitu “penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai atau dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.” Selain itu peneliti memilih metode *purposive* karena dirasa lebih mudah untuk menentukan kriteria dan informan, dengan *purposive* yang menjadi informan hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan saja.

Dalam penelitian ini, penulis menentukan informan dengan cara menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan yang dilakukan dengan cara

sengaja oleh peneliti. Sementara pembagian informan dalam penelitian ini dipilah menjadi dua kelompok informan yang dipilih berdasarkan fungsinya, yakni:

3.4.1 Informan Pokok (*Primary Informan*)

Informan pokok berfungsi sebagai aset sumber data yang paling utama dalam penelitian ini, dengan hal tersebut peneliti menentukan informan pokok yaitu Ketua UPPKH Kab/Kota, selain itu Koordinator UPPKH Kab/Kota yang bertanggung jawab dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Berdasarkan teknik penentuan informan dalam penelitian ini yakni menggunakan *purposive*, informan pokok ialah Ketua dan Koordinator UPPKH yang mengetahui banyak tentang sejarah, aktifitas, dan kegiatan-kegiatan sosial oleh UPPKH di Kabupaten.

Pemilihan informan pokok dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan orang yang memahami betul tentang apa itu PKH (Program Keluarga Harapan), bagaimana visi, misi, manfaat dan tujuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan beberapa kegiatan sosial yang dilakukan UPPKH.
- b. Merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam UPPKH Kabupaten/Kota (pendamping), sehingga dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya, seluas-luasnya, terkait dengan objek penelitian.
- c. Telah masuk dalam sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota hingga sekarang (2014).

Pemilihan informan pokok tersebut di atas dengan alasan:

- a. Ditetapkan oleh peneliti karena untuk mengetahui tentang UPPKH Kabupaten Jombang dan bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui program-program sosial. Dengan demikian, sudah pasti sangat membutuhkan informan yang dapat memberikan informasi atau data yang erat kaitannya dengan informasi mengenai UPPKH Kabupaten Jombang serta informasi bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui program-program sosial.
- b. Ditetapkan dengan pertimbangan bahwa para pendamping yang berpartisipasi aktif (terlibat langsung) di dalam UPPKH Kabupaten, dapat mengetahui seluk-beluk UPPKH Kabupaten dan dengan *power* (kekuasaan) yang dimiliki mampu memberikan informasi yang berharga kepada peneliti seperti menunjukkan bagaimana upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui berbagai program sosial, bagaimana monitoring dalam program-program sosial tersebut, dan dengan kekuasaan mereka tersebut mereka dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada peneliti untuk mendapatkan informasi dibutuhkan khususnya di lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti.

Peneliti mempertimbangkan dengan memilih informan yang ada tersebut dengan alasan yaitu mereka mengerti betul bagaimana perkembangan UPPKH kabupaten Jombang dari tahun ke tahun, apa saja yang sudah dicapai dalam upaya kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial di Kabupaten Jombang.

3.4.2 Informan Tambahan (*Secondary Informan*)

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005:172). Informan tambahan biasanya orang yang dianggap tahu tentang segala kejadian (masih berhubungan dengan data pokok penelitian) yang dialami oleh informan pokok. Informan tambahan berfungsi untuk pengecekan ulang keabsahan data yang telah didapatkan dari informan pokok sebelumnya. Dalam penentuan

informan tambahan, peneliti menggunakan teknik *snowball*. Adapun karakteristik dalam penentuan informan tambahan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang menjadi peserta PKH Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, atas rekomendasi dari pendamping PKH peneliti menentukan sedikit dari sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan masalah yang paling penting dalam penelitian karena akan banyak mempengaruhi data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dan menghindari akan kualitas data yang buruk, sedangkan data tersebut dijadikan sebagai pengidentifikasian fenomena yang diteliti. Maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi Partisipatif

Metode observasi partisipatif merupakan pengamatan pada suatu kejadian untuk tujuan penelitian, selanjutnya dari pengamatan tersebut dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, data dan fakta yang akan diteliti secara langsung dalam waktu dan tempat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipatif pasif, yaitu penulis lebih menonjolkan sebagai peneliti/pengamat di suatu situasi sosial, meskipun kadang-kadang juga ikut serta secara seadanya sebagai pelaku kegiatan sebagaimana layaknya “orang dalam” (Faisal, 1990:79).

Dalam observasi ini, peneliti akan secara langsung mengamati keadaan sebenarnya di lapangan tanpa sengaja terdapat usaha untuk mempengaruhi mengatur dan memanipulasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi terus terang dan tersamar. Menurut Faisal (1990:79)

“Sebagaimana halnya wawancara, observasi juga dapat dilakukan dengan secara terus-terang (tidak tersamar), jadi mereka yang tengah diteliti mengetahui sedari awal bahwa peneliti melakukan kegiatan penelitian. Observasi pada keadaan/situasi tertentu, peneliti dapat juga melakukan observasi secara tersamar sebab adalah tidak *realistic* untuk serba “terus terang” mengamati suatu situasi”.

Dalam penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini, cara kerjanya peneliti menggunakan observasi terang-terangan dalam penelitian ini, karena ditakutkan ada data yang bersifat rahasia yang nantinya tidak boleh untuk dipublikasikan, dengan itu maka peneliti memberitahu dari awal bahwa ini adalah kegiatan penelitian, untuk meminimalisir kesalahpahaman diakhir setelah data akan disajikan. Kemudian peneliti juga menggunakan observasi tersamar, dikhawatirkan banyak olahan data yang dimunculkan atau ditampakkan, sehingga data yang diperoleh tidak apa-adanya. Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan dari

beberapa kegiatan program-program sosial UPPKH Kabupaten Jombang dengan tersamar, supaya data yang diperoleh adalah data yang sebenarnya.

Dari teknik itulah peneliti menggali informasi untuk mengetahui secara utuh proses dengan beberapa program-program sosial terealisasikan dalam memberikan upayanya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Sehingga penelitian dapat dilakukan secara optimal. Serta mendapatkan data yang dibutuhkan dengan tingkat kevalidan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk diinformasikan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2010 : 186) adalah “percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Penulis melakukan wawancara bukan sekedar upaya tanya jawab untuk memperoleh informasi saja melainkan juga upaya untuk memperoleh kesan langsung dari informan baik lewat gestur maupun tutur kata, memancing jawaban informan, menilai kebenaran jawaban yang diberikan dan bilamana perlu memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam (*indept Interview*) untuk dapat mengeksplorasi informasi dari informan hingga mendapatkan data jenuh. Wawancara antara peneliti dan informan terfokus pada pada persepsi diri informan, kehidupan, dan pengalaman, dan ekspresi saat berbicara. Hal tersebut merupakan cara penulis untuk mendapatkan akses dan data selengkap- lengkapnya.

Menurut Irawan (2006:70) wawancara mendalam (*indept interview*) terbagi menjadi tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan format wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah model yang lebih dekat dengan wawancara tidak terstruktur daripada model wawancara terstruktur. Wawancara ini bersifat fleksibel dapat menggunakan percakapan sehari-hari agar tercipta keakraban, namun tetap terkontrol dan diarahkan oleh *interview guide* untuk kepentingan penelitian. Unsur kontrol dianggap rendah, namun hal itu bertujuan untuk menjaga kevalidan data dan menciptakan kepercayaan antara informan dan peneliti, jadi diharapkan informasi yang diberikan oleh informan masih utuh dan asli hasil pikiran informan tanpa ada unsur pengubah misalnya rasa curiga, takut atau tidak nyaman informan pada saat proses penelitian berlangsung.

Wawancara dilakukan di kediaman informan ada pula yang dilakukan di tempat informan bekerja (kantor), yaitu ketika informan berada di tempat umum atau informan dalam kondisi sendirian saja ataupun dalam keadaan (*cangkru'an*) di pinggir jalan bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi informan ketika memberikan informasi. Pada pelaksanaannya tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan informan pokok, melainkan juga mengecek pada informan tambahan serta mengecek ulang dalam kenyataan melalui pengamatan, itulah sebabnya cek dan ricek dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan dilapangan atau dari informan yang satu ke informan yang lainnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam yaitu mobile phone. Wawancara dengan informan direkam baik secara tersembunyi, yaitu ketika peneliti ikut bergabung dengan pendamping saat mengikuti acara berkumpulnya semua pendamping PKH se-Kabupaten. Dan wawancara terbuka ketika penulis melakukan percakapan langsung dengan informan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan

informasi yang sebenar-benarnya, dan konsistensi informan dalam memberikan informasi baik ketika informasi mengetahui bahwa pembicaraannya sedang direkam ataupun tidak direkam.

3.5.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data sekunder yang perlukan guna menunjang data primer yang telah diperoleh data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.

Beberapa data sekunder tersebut peneliti dapatkan dari media- media informasi seperti internet, buku, foto, artikel, profil UPPKH dan lain sebagainya untuk melengkapi data sekunder demi kelengkapan dan kejenuhan data. Bentuk kongkret pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa kerangka foto- foto dokumentasi antara peneliti dengan informan pada saat melakukan wawancara yang disetujui dan yang tidak disetujui, catatan observasi, rekaman atau transkrip wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama untuk menganalisis dan menggeneralisasikan data secara cermat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Analisis data berbentuk deskriptif menurut Sugiyono (2007:63) mengatakan bahwa:

“Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian (individu) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang diperoleh akan diuraikan dengan sejelast-jelasnya dan digambarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata”.

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian ini akan dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan. Menurut kategori tertentu dan menguraikan serta menafsirkannya sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan untuk memudahkan dalam mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

a. Pengumpulan data mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini, peneliti menggunakan alat-alat pendukung seperti *handphone* dengan fitur kamera, perekam suara (*voice record*), buku catatan lapangan dan lain-lain. Peneliti tidak mencampurkannya dengan pikiran, komentar, sikap peneliti, semua dicatat apa adanya.

b. Transkrip data

Pada tahap ini, peneliti merubah catatan ke dalam bentuk tertulis (baik yang berasal dari *recorder* atau catatan tulisan tangan). Semuanya diketik persis seperti apa adanya (verbatim) tanpa mencampuradukan dengan pendapat dan pikiran peneliti.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi.

Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber 180° bertolak belakang dengan sumber lain.

d. Kesimpulan akhir

Ada kemungkinan peneliti akan mengulangi langkah satu sampai langkah tiga berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir diambil ketika merasa data sudah jenuh.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Metode keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian sosial yang secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian yang bersifat empiris, informasi yang diberikan maupun perilaku masing-masing informan mempunyai makna sehingga tidak dapat langsung diterima begitu saja, oleh karena itu harus dilakukan pengujian keabsahan data. Pengukuran keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dezim dalam Bugin (2001 : 105) menyatakan bahwa penggalan data dengan menggunakan berbagai sumber dan teknik di sebut data *triangulation* maupun *investigator triangulation*. Triangulasi dalam sumber Patton dalam Moleong (2008:330) bahwa “Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan berupa wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Untuk melihat keabsahan data diperlukan standar khusus yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan standar kredibilitas dengan cara triangulasi. Standar kredibilitas diperlukan supaya hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh para pembaca, dan juga dapat disetujui kebenarannya oleh informan yang diteliti.

Pengujian kevalidan data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan standar kredibilitas dengan cara triangulasi. Moleong (2007:330) menyatakan bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu sendiri”. Menurut Moleong (2007:330-331), teknik triangulasi data dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Pada triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam hal ini, jika analisis telah menggunakan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Penelitian ini hanya mempergunakan teknik triangulasi sumber data. Dengan triangulasi sumber data, peneliti akan memadukan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB 4. PEMBAHASAN

4. 1. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan program keluarga harapan (PKH). Program serupa di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional cash transfer* (CCT) yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan dalam upaya perlindungan sosial pada masyarakat miskin.

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen sosial, Departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika dan badan pusat statistik. Untuk mensukseskan program tersebut maka oleh Tim Tenaga Ahli PKH dan konsultan *World Bank*.

Menurut Akifah Elan-sari, direktur jaminan kesejahteraan sosial dan departemen sosial (deposos), PKH merupakan program terobosan untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan sekaligus sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. PKH merupakan program baru dan pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia yang dilakukan secara terintegrasi dan implementasinya melalui beberapa sektor dan multi *stakeholder*. Program keluarga harapan (PKH) diluncurkan oleh Presiden SBY di Gorontalo Juli 2007. Pada tahap awal dilaksanakan di tujuh provinsi melibatkan 500.000 kepala rumah tangga yang sangat miskin, dengan definisi rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan dan sebagian pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, biasanya tidak mampu untuk atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang disubsidi pemerintah, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun, biasanya tidak atau hanya mampu menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan SLTP.

Pada tahap awal, uji coba PKH dilaksanakan di tujuh provinsi, yaitu Sumbar, Jabar, DKI Jakarta, Jatim, Sulut, Gorontalo dan NTT serta di 48 kabupaten/kota dan 337 kecamatan. Kemudian pada tahun 2008 dilakukan pengembangan di enam provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. Sasaran penerima bantuan pada tahun 2007 sebanyak 400.000 KSM, tahun 2008 sebanyak 620.755 KSM, tahun 2009 sebanyak 720.000 KSM, dan tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat menekan angka kemiskinan.

Besaran dana insentif bervariasi. Untuk satu KSM yang memiliki satu anak untuk keperluan sekolah di SD Rp.400.000,00/tahun, sedangkan SMP Rp. 800.000,00/tahun. Untuk keperluan ibu hamil atau balita Rp.800 ribu/tahun, di samping itu pun terdapat dana pengurusan Rp. 200.000,00/tahun yang diterima masing-masing KSM sasaran. Setiap KSM minimal mendapatkan Rp. 600.000,00 terbesar Rp. 2,2 juta dalam setahun dan disalurkan setiap tiga bulan. KSM yang akan mendapatkan dana insentif harus memenuhi ketentuan saat registrasi, yakni memiliki anak usia 6-15 tahun atau kurang dari 18 tahun namun belum menyelesaikan

pendidikan dasar, memiliki anak usia 0-6 tahun, atau terdapat ibu yang sedang hamil. Untuk pemenuhan aspek pendidikan dan kesehatan inilah dana insentif dikucurkan pemerintah.

Tujuh Provinsi adalah: Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008, ditambah lagi menjadi 13 provinsi. Enam tambahan itu adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. PKH sudah dilaksanakan di 72 kabupaten di 13 provinsi, dengan penerima 700 ribu KSM pada tahun 2008. Anggarannya berasal dari APBN. Tahun 2007 dianggarkan Rp 1 triliun, 2008 meningkat menjadi Rp 1,1 triliun.

4. 1. 1 Tujuan PKH

Tujuannya PKH adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok sangat miskin. Melalui pemberian insentif ini mereka mau melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan), bukan pengobatan (kuratif). PKH juga bertujuan mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan upaya mengurangi pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KSM Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari KSM
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM.

4. 1. 2 Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran program ini adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih, mekanisme pemilihan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai kriteria yang ditetapkan, yakni Keluarga Sangat Miskin (KSM) ibu hamil/nifas, memiliki bayi hingga berusia 6 (enam) tahun dan anak sekolah hingga 18 tahun, komponen ini berkaitan dengan pendidikan, namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta KSM tersebut dapat menjadi peserta PKH apabila anak tersebut didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, atau Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Anak di bawah satu tahun mendapat imunisasi lengkap gratis dan ditimbang secara rutin setiap bulan. Bayi usia 6-11 bulan berhak mendapatkan suplemen A dua kali setahun. Anak berusia 5-6 tahun berhak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang. Anak usia 6-15 tahun yang terdaftar di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Anak usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan yang berlaku. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan :

1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar
2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak

3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu Hamil.

Besar bantuan tergantung dari kondisi masing-masing keluarga, jumlahnya akan berubah dari waktu ke waktu, tergantung kepada kepatuhan keluarga memenuhi kewajiban. Besarnya bantuan berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp.2.200.000 (lihat Artikel dari Kementerian Sosial RI) yang terdiri dari: (1) Bantuan tetap sebesar Rp 200.000; (2) Bantuan pendidikan SD/MI Rp 400.000; (3) Bantuan pendidikan SMP/MTs Rp 800.000; dan (4) Bantuan kesehatan untuk ibu hamil/nifas, bayi dan atau balita sebesar Rp 800.000.

Bantuan di atas diberikan per tahun, kecuali bantuan tetap sebanyak 200.000 diberikan per 3 (tiga) bulan. Bantuan kesehatan dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan KSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata KSM per tahun, bantuan tersebut akan dibayarkan empat kali dalam setahun. Uang bantuan tersebut dapat diambil di kantor pos terdekat dengan membawa kartu anggota dan tidak dapat diwakilkan. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam program tersebut adalah sebagai berikut.: PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH.

Adapun ketentuan dalam program keluarga harapan ini yang berhak menerima uang bantuan ini dalam pengambilannya tersebut adalah wanita dewasa KSM (keluarga sangat miskin). Dipilihnya ibu/ wanita dewasa yang KSM yang mengasuh anak sebagai penerima bantuan dikarenakan wanitalah yang biasanya sehari-hari mengurus keperluan gizi dan kesehatan anak-anak dan keluarga, serta mamastikan anak-anak ke sekolah.

Jadi dengan memberikan bantuan tunai kepada wanita dalam rumah tangga peserta PKH, diharapkan mereka bisa mengatur pemanfaatan dana dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Meski begitu, peran peran kepala rumah tangga/ suami sangat penting dalam mendukung pengaturan pemanfaatan dana bantuan. (*Pedoman Umum PKH, 2008*)

4. 1. 3 Kerangka Kelembagaan Tingkat Pusat dan Fungsinya

Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta UPPKH yang dibentuk tingkat pusat, kabupaten kota/kecamatan. Susunan tim pengendali program keluarga harapan mempunyai tugas dan fungsi. Dasarnya adalah kerangka kelembagaan PKH dan struktur organisasi yang memiliki garis komando dan garis koordinasi yang seimbang (dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas).

- **Susunan Tim Pengendali**

- a. Pengarah,

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- b. Pelaksana,

- Ketua : Deputi Bidang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- c. Teknis,

Ketua : Direktur Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat
Kementrian Negara PPN/Bappenas

- **Tugas Dan Fungsi Tim Pengendali**

- a. Pengarah

- Memberikan pengarahan kepada pelaksana baik materi yang bersifat substansif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian program keluarga harapan.

- b. Pelaksana

- 1) Merumuskan konsep kebijakan operasional Koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program keluarga harapan. Menentukan kriteria dan daftar penerima program keluarga harapan.
 - 2) Melakukan sosialisasi program keluarga harapan ke berbagai kalangan di pemerintah dan masyarakat.
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program keluarga harapan serta melaporkan hasilnya kepada menteri koordinator bidang kesra.
 - 4) Menilai hasil manfaat dan dampak dari pelaksanaan program keluarga harapan kepada terhadap pengurangan kemiskinan.
 - 5) Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan program keluarga harapan kepada pengarah.
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh menteri koordinator bidang kesra

- c. Teknis

- Membantu tim pelaksana dalam melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam merumuskan kebijakan, desain, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi program keluarga harapan.

- **Tim Pengarah Pusat**

- Tim Teknis Pusat adalah Pejabat Esion I dari:

- a. Kementrian PPN / Bappenas
 - b. Departemen Sosial
 - c. Departemen Kesehatan
 - d. Departemen Pendidikan
 - e. Departemen Keuangan
 - f. Departemen Agama
 - g. Departemen Komunikasi dan Informatika
 - h. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - i. Departemen Dalam Negeri
 - j. Badan Pusat Statistik

- **Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis Pusat adalah:**

- a. Memberikan pengarahan dan menyetujui desain dan rencana pelaksanaan program
 - b. Memberikan pengarahan dan menyetujui mekanisme dan prosedur pelaksanaan PKH

- c. Mengkaji laporan perkembangan program setiap 6 bulan sekali
- d. Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan audit
- e. Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan evaluasi
- f. Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam pedoman umum PKH
- g. Memecahkan berbagai masalah lintas sektor yang telah teridentifikasi oleh Tim Teknis Pusat
- h. Meningkatkan kolaborasi antar departemen dalam mencapai tujuan PKH
- i. Memberikan rekomendasi strategi pengembangan PKH baik kepada pemerintah maupun legislatif

Tim Pengarah pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya 6 bulan sekali. Ketua tim teknis pusat (Pejabat Eselon I), bersama-sama dengan anggota tim pengarah pusat, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah atas tugas dan tanggung jawab seperti tertulis disetiap 6 (enam) bulan sekali.

- **Tim Koordinasi Teknis Pusat**

Anggota Tim Teknis Pusat terdiri atas pejabat eselon 2 dan / atau eselon 3 yang ditunjuk dari kementerian dan diketuai oleh Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Untuk pengelolaan keuangan program, Pejabat Pembuat Komitmen adalah Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial

Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Pusat adalah:

- a. Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh UPPKH Pusat
- b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sektoral terkait agar tujuan dan fungsi program dapat berjalan baik
- c. Membentuk tim lintas sektor yang bertugas untuk menentukan peserta PKH
- d. Memonitor perkembangan (pelaksanaan program termasuk pengaduan masyarakat dan penanganannya, dan mengajukan perbaikan apabila diperlukan)
- e. Mengkaji laporan evaluasi yang akan dipresentasikan kepada Tim Pengarah
- f. Mengkaji laporan audit yang akan dipresentasikan kepada Tim Pengarah

Tim Koordinasi Teknis Pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya setiap 3 bulan sekali. Ketua Tim Teknis Pusat, bersama-sama dengan anggota tim teknis lainnya, berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada tim Pengarah Pusat setiap 3 bulan sekali.

Tim Koordinasi Teknis PKH pusat yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga terkait dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya (Bappenas untuk perencanaan dan evaluasi program, Departemen Sosial untuk Pelaksanaan PKH, BPS untuk pendataan rumah tangga miskin, Departemen Komunikasi dan Informatika untuk Sosialisasi, serta Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen kesehatan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan). Dalam rangka koordinasi PKH dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya, PKH berada dibawah koordinasi

tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik dipusat maupun didaerah. Untuk itu, TKPK membentuk tim pengendali PKH yang berfungsi mengkoordinasikan dan mensinergikan tujuan PKH dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lainnya. Koordinasi PKH dengan TKPK daerah, apabila telah dibentuk, diharapkan dapat mengikuti pola koordinasi yang dilakukan di tingkat Pusat.

- **Unit Pelaksanaan PKH Pusat (UPPKH-P)**

Unit Pelaksana PKH Pusat adalah pelaksana program yang berada di bawah kendali Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial.

- **Organisasi PKH Pusat (UPPKH-P)**

Personil UPPKH Pusat terdiri atas pegawai Departemen Sosial RI, Tim Assistensi, Tenaga Ahli, dan Praktisi/Narasumber yang ahli dibidangnya, serta tenaga pendukung berupa tenaga operator komputer dan *technical support*. Tenaga Ahli PKH pada tahap awal membantu pembuatan desain PKH dan pada tahap selanjutnya turut mengelola dan menjalankan PKH agar terjaga kesinambungan program. Tenaga Ahli ini meliputi:

- a. Koordinator Wilayah
- b. Ahli Pendidikan
- c. Ahli kesehatan
- d. *System analyst*
- e. *Programmer*
- f. Analisa Data
- g. Ahli Statistik
- h. *Payment Officer*
- i. Ahli *Social Marketing*
- j. Ahli Bidang *Monitoring*

Tim Assistensi bertugas memback up kebutuhan tenaga ahli yang belum *tercover* pada tahun berjalan. Praktisi/Nara Sumber bertugas memberikan masukan mengenai keberlangsungan Program, menjalankan fungsi pemantauan dan koordinasi dengan Tim UPPKH Pusat dan daerah.

Tenaga Operator bertugas mendukung pelaksanaan PKH, meliputi *entry data*, menerima pengaduan, mengadakan pemuktahiran data dan hal lain yang mendukung PKH. Technical Suport bertugas membantu jalannya proses sirkulasi data (menjaga dan membantu memperbaiki jaringan listrik, telepon, internet apabila bermasalah) dan pelaksanaan kerja UPPKH Pusat. Kebutuhan Tim Assistensi, Tenaga Ahli, Praktisi/Narasumber, tenaga operator maupun *technical support* pada tiap tahunnya bervariasi, tergantung pada pelaksanaan program dan perkembangan besaran jumlah jangkauan wilayah pelayanan dan

jumlah KSM. Struktur Organisasi UPPKH Pusat, serta tugas dan tanggung jawabnya secara rinci terdapat dalam Pedoman Operasional Kelembagaan.

- **Kelembagaan PKH Daerah**

Tim Koordinasi PKH di tingkat daerah terdiri atas : (i) Tim Koordinasi PKH provinsi dan (ii) Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota. Pembahasan ini membahas tugas-tugas dan tanggung jawab serta proses pembentukan tim koordinasi PKH Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

- **Tim Koordinasi PKH Provinsi**

Tujuan pembentukan Tim Koordinasi PKH Provinsi adalah untuk memantua semua kegiatan PKH di tingkat Provinsi serta untuk memastikan komitmen daerah terkait dengan PKH terpenuhi.

- **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum terdiri atas tugas melakukan:

- a. Koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH
- b. Koordinasi rutin terhadap partisipasi provinsi dan kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan PKH.

Secara lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Operasional Kelembagaan PKH.

4. 1. 4. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UUPKH) Pada Tingkat Kabupaten Jombang.

1. Tentang UPPKH Kecamatan/Kota

Tim Koordinasi PKH tingkat Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PKH. UPPKH kecamatan merupakan kunci untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara UPPKH kecamatan dengan UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten kota.

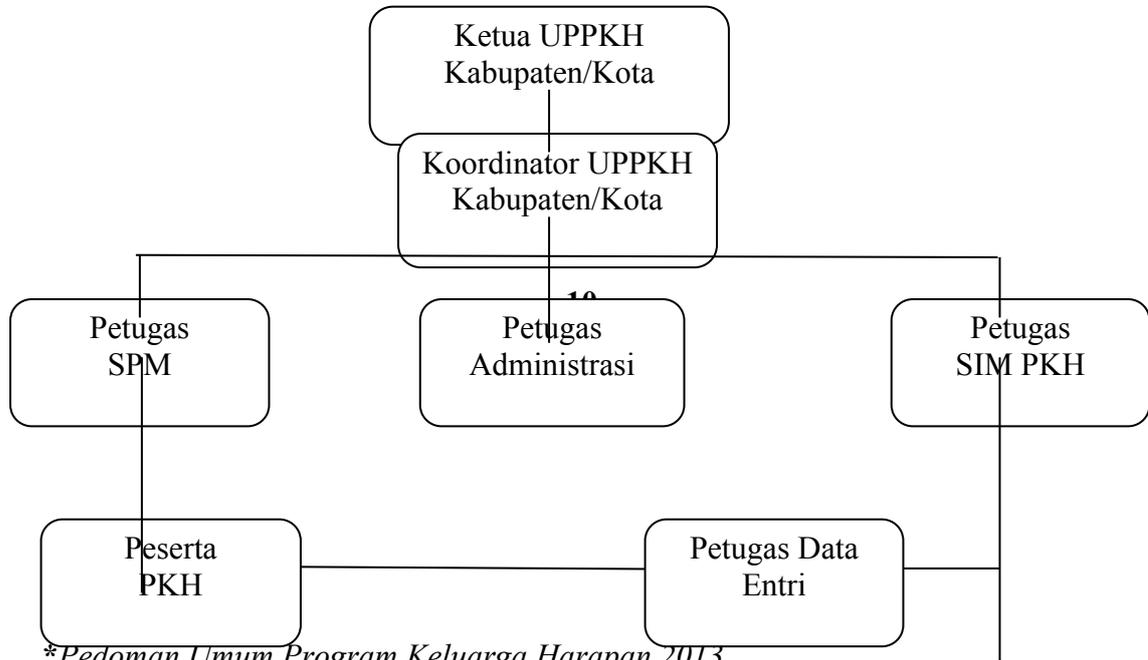
UPPKH daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I, melalui proses pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan di tingkat pusat. Calon personel UPPKH diusulkan oleh daerah Kabupaten/Kota penerima PKH. Kebutuhan personel UPPKH Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh Unit ini. Susunan personel UPPKH Kabupaten Kota ditetapkan oleh Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia. Wilayah kerja personel UPPKH Kabupaten/Kota meliputi seluruh Kecamatan PKH dalam satuan wilayah kerja di tingkat Kabupaten /Kota.

Dalam pelaksanaan UPPKH Kabupaten/Kota ini tidak terlepas dari peran serta UPPKH secara keseluruhan, untuk itu perlu dibuat acuan dan tanggung jawab dari masing masing petugas yang ada pada UPPKH Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. Ketua UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tim sekretariat Koordinasi PKH Kabupaten/Kota).
2. Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota (salah satu dari tenaga operator yang terpilih pada pelatihan)
3. Administrasi
4. Data *entry*/operator Komputer (SIM-PKH)
5. Sistem Pengaduan Masyarakat.

6. Pola hubungan pendamping UPPKH dan Peserta PKH

Gambar 4.1
Hubungan pendamping PKH dan peserta PKH



**Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2013*



Koordinator UPPKH Kabupaten dan Pendamping PKH

4.2 Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Suku Dinas Sosial Kabupaten Jombang Jawa Timur

Pada akhir 1980-an, ada beberapa alasan pergeseran istilah *community organizer* (OC) menjadi pendamping, antara lain :

- 1) Banyak anggota komunitas yang tidak paham dengan istilah CO
- 2) Terkesan bahwa CO merupakan orang yang dirasa lebih pandai dan serba tahu mengenai organisasi daripada anggota komunitas
- 3) Beberapa anggapan atau tanggapan bahwa CO lebih menekankan pada visi, misi, tujuan dan hasilnya yang bersifat politis

Padahal situasi saat itu banyak rakyat yang phobia mendengar dan melibatkan diri pada kegiatan yang berbau politik. Dalam proses waktu ke waktu bahwa perubahan istilah itu juga turut menggeser makna istilah *Community Organizer* yang sebenarnya merupakan proses akhir aksi yang dilakukan dengan penekanan pada penguatan rakyat, yaitu terbentuknya organisasi rakyat yang kuat dan dilakukan melalui proses aksi sampai meningkat kesadarannya menjadi pemberdayaan. (*Peran Pendamping LSM dan Komunitas, 2010*)

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan tersebut, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) melakukan tugas dan persiapan program yang meliputi bidang pekerjaan yang sesuai dengan kerja dan kebutuhan pendamping. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan pada penerima manfaat. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH, menginformasikan (sosialisasi) program kepada KSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum, mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok ibu-ibu peserta PKH, membantu peserta PKH dalam mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/kota, mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.

Tugas Rutin pendamping PKH adalah menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/Kota, menerima pengaduan dari ketua kelompok atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima, melakukan kunjungan insidental khususnya pada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen, melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program), melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan, melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok, melakukan pertemuan bulanan dengan pelayan Kesehatan dan Pendidikan di lokasi pelayanan terkait, melakukan pertemuan triwulan dan tip semester dengan seluruh pelaksana kegiatan antara lain : UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Kesehatan dan Pendidikan.

4.2.1 Beberapa peran yang harus dilakukan pendamping PKH, yaitu :

7. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Barker (1987), memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

a. Mendampingi Proses Pembayaran

Pada dasarnya pendamping tidak melakukan kegiatan apapun kecuali pengamatan dan pengawasan selama proses pembayaran berlangsung. Namun begitu, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pendamping sebelum kegiatan berjalan agar proses pembayaran aman dan terkendali, yaitu

- *Pergi ke Kantor Pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata penerima manfaat yang merupakan kelompok binaannya,*
- Menginformasikan kepada Ketua Kelompok mengenai jadwal dan memastikan bahwa pembayaran diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping untuk menginformasikan (sosialisasi) program kepada KSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum. Dalam pertemuan awal yang dilakukan pada tanggal 05 September 2014 bertempat di kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, dalam rangka mengelompokkan masing-masing peserta ke dalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan. Dalam pemilihan kelompok peserta PKH pendampinglah yang berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang telah ditetapkan oleh pendamping, hal tersebut diperkuat oleh Mas Ony (Pendamping Kecamatan Kabuh) :

“Jadi untuk pemilihan ketua kelompok, saya sendiri aja yang mengelompokkan bukan dari pihak siapa-siapa...terus...dipilih ketua kelompoknya...kenapa dibuat berkelompok, karena biar gampang untuk masalah pendampingan dan untuk mempermudah pada saat pembayaran di kantor pos”

Selanjutnya dalam pertemuan awal ini, membantu peserta PKH mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota.



Pencairan dana program PKH bertempat di Kantor Pos Kecamatan

b. Memfasilitasi Proses Pengaduan

Pendamping menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan mutu program. Dalam hal ini Mas Ony mengatakan :

“sebagai contohnya, dulu pernah ada mas..., salah satu ibu peserta PKH tidak bisa ikut pemeriksaan rutin untuk anaknya di Posyandu karena sakit..., beliau bingung dan takut bantuan PKH-nya diberhentikan karena kartu Posyandu untuk anaknya ada yang belum terisi..., dan ini menjadi tugas saya membantu ibu tersebut dengan berkoordinasi ke pihak Posyandu”

c. Pendampingan Rutin

Jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 hari kerja (Senin sampai Kamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelaksanaan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, mengurus akta lahir maupun pemeriksaan kesehatan rutin ke Puskesmas. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah. Pendamping harus mendampingi dalam proses pengisian data kepesertaan Program Keluarga Harapan, hal tersebut juga dinyatakan oleh Mas Ony sebagai pendamping di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang :

“Wajar aja ya mas, kan gak semua ibu-ibu bisa baca semua...jadi saya ikut mendampingi dan menerangkan untuk mengisi formulirnya...padahal sudah berulang-ulang cara mengisi formulirnya...tetapi tetap saja ada yang salah, buat masalah kunjungan ke sekolah, puskesmas, atau Rumah sakit, saya hanya melaporkan bahwa apabila ada ibu-ibu yang datang atau periksa, kemudian dia menunjukkan kartu PKH maka ibu tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun...karena, pihak Puskesmas dan rumah sakit sudah berkoordinasi dengan pihak UPPKH Kabupaten”

Dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam pertemuan awal ini sangat dibutuhkan, baik dalam penyampaian informasi dari koordinator program ataupun menyampaikan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan. Karena segala program yang berkaitan dengan masyarakat, pendamping sangatlah dibutuhkan demi tercapainya visi dan misi program tersebut.

d. Monitoring dan evaluasi

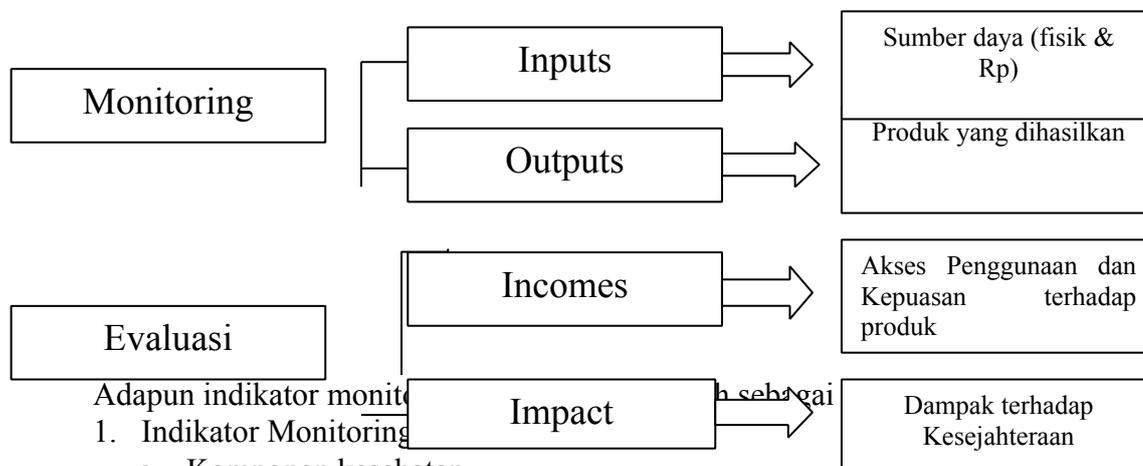
Pengawasan pada anggota masyarakat pun dilakukan secara berkala. Dengan demikian pengembangan pelaksanaan PKH di daerah lain akan dilakukan jika hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan tanda-tanda positif terhadap pencapaian tujuan. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan PKH. Diungkapkan oleh ibu Martini salah satu peserta PKH dari Kecamatan Kabuh, beliau mengatakan bahwa :

”Sudah banyak terbantu mas, sekolah anak saya jadi gak terlalu kepikiran masalah bayar spp, karena ada usaha kelompok.... hasilnya buat beli sepatu, kalau ada lebihnya saya belikan seragam sekolah bekas mas..hehehe, anak saya juga jadi rajin sekolahnya karena ada mas Ony yang ngontrol absen kehadiran anak saya... anak saya juga takut kalau jarang masuk sekolah, takut bantuannya diputus, saya sendiri juga takut mas..., pendamping juga ngecek timbangan balita..., jadi ibu-ibu yang lain juga rajin periksa ke posyandu, puskesmas juga..., ibu-ibu yang lain juga takut kalau periksanya gak rutin, ketauan dari kartunya, takut diputus jadi peserta PKH mas..”

Monitoring PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi masukan (inputs) dan luaran (outputs). Program monitoring ini akan mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan PKH sehingga memberi kesempatan pada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil dan dampak pelaksanaan PKH. Kerangka pikir program monitoring dan evaluasi PKH adalah sebagaimana digambarkan pada table 4.2

Gambar 4. 2 :

Kerangka Pikir Program Monitoring dan Evaluasi PKH



Adapun indikator monitoring

1. Indikator Monitoring

- Komponen kesehatan
- Komponen pendidikan
- Aspek pembayaran
- Aspek administrasi

2. Indikator Evaluasi

- Indikator hasil PKH
- Indikator dampak PKH

8. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. Inisiatif pemerintah melahirkan Program Keluarga Harapan (PKH) serta membentuk para pendamping tidak bisa dikatakan adanya intervensi karena memandang masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin (KSM) adalah masyarakat yang memiliki mental ketergantungan, kebodohan atau sering melakukan kesalahan, berkaitan dengan masalah yang manifes itu. Terpenting, tindakan itu dimusyawarahkan dan diputuskan seluruh anggota serta bukan inisiatif dari beberapa orang atau individu saja.

Dengan demikian inisiatif pemerintah mendatangkan para pendamping adalah indikasi adanya kesadaran bahwa masyarakat dengan kemampuan diri mereka sendiri, dengan tetap melalui arahan, pengawasan, dan kerja sam antar masyarakat dan pendamping menandakan bahwa sudah ada dan berjalannya mekanisme kerja di masyarakat. Sering juga terjadi inisiatif datang dari pendamping ke dalam masyarakat saat di suatu wilayah terjadi kasus seperti adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Misalnya, pendamping PKH Kecamatan Kabuh, membuat atau mengumpulkan uang kas. Diharapkan dengan inisiatif ini masyarakat menyadari bahwa mereka harus tidak selalu membentuk satu usaha yang berawal dari diri pribadi mereka sendiri, dan pendamping sangat mengharapkan bahwa beban tersebut dapat dipikul bersama.

Hal ini, menurut Mas Ony telah sering dikatakan dan dihimbau kepada masyarakat sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH), dia mengatakan :
“Uang kas itu diharapkan terkumpul untuk membantu keberlanjutan program anggota itu sendiri, agar mereka dapat meringankan beban masing-masing yang lainnya..., juga tidak memberatkan ketua kelompok seorang diri dalam hal kegiatan semacam diskusi dan pertemuan yang dilakukan...”.

9. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi atas kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Mengunjungi Penyedia Layanan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital dalam keberlangsungan maupun peningkatan mutu program. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa melakukan tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran program daripada memperbaikinya. Seperti yang telah dikatakan Mas Ony :

”Selain itu, sebagai pendamping saya juga harus sering mengunjungi Puskesmas, Posyandu, juga tempat anak-anak peserta PKH bersekolah.. , biar saya bisa tahu proses pelayanan lembaga-lembaga itu seperti apa dan juga biar saya bisa menjalin kerja sama dengan lembaga tersebut demi kelancaran para peserta PKH”.

10. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan mencolok dan mengarah pada konflik antar berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela dimana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien memenangkannya sendiri. Adapun kerja pendamping adalah sebagai individu-individu yang mengarahkan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk keluar dari problem yang mereka hadapi.

Sejalan dengan itu Mas Ony mengatakan :

“Bahwa masyarakat diharapkan merubah paradigma yang mereka miliki atau pola pikir yang terus menunggu diberikan orang lain baik itu pemerintah atau orang-orang yang memiliki kebersihan hati nurani untuk membantu”

Terlihat bahwa pendamping masyarakat mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan dapat menjangkau, memanfaatkan, memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada didekat dirinya.

Selaras dengan yang dikatakan oleh Baker, Dubois dan Miley (1992) menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya.

a. Berdiskusi Dalam Kelompok

Kegiatan yang tidak kalah penting adalah menyusun agenda dan mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok ibu penerima bantuan untuk berdiskusi dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu. Seperti yang dikatakan Mas Ony :

“dengan adanya pengelompokan, akan memudahkan saya sebagai pendamping peserta PKH baik dalam pendampingan maupun ketika pencairan dana bantuan di Kantor Pos.., dan juga akan lebih memudahkan saya untuk menampung macam-macam pengaduan dari ibu-ibu peserta PKH”

b. Berkunjung ke Rumah Penerima Bantuan

Jika pada saat pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan tertentu seperti lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk memudahkan proses. Dalam hal ini Mas Ony mengatakan bahwa :

“apabila ibu peserta tidak bisa datang di saat pencairan dana.., saya harus melakukan kunjungan ke rumahnya biar tahu alasan mengapa beliau tidak bisa datang.., dan pembayaran bisa diserahkan di rumahnya dengan bantuan dari salah satu pihak Kantor Pos”

11. Advokasi

Peran pendamping ketika berhadapan dengan sistem politik maupun bidang hukum

a. Pembela

Dalam prakteknya, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memerankan peranan sebagai pembela. Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus, dan pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Memang secara ideal hubungan antara *pendamping* dan masyarakat dalam program PKH, adalah inisiator yang datang dari pemerintah atas dasar tanggung jawab bersama dalam mensejahterakan seluruh komponen masyarakat tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia inisiator itu banyak datang dari pendamping dari luar komunitas (*outsider*) dan jarang datang dari anggota komunitas itu sendiri. Kecuali komunitas yang wilayahnya hidup terjadi kasus atau masalah yang sifatnya manifes (*nampak*) dan struktural. Misalnya, penggusuran tanah, PHK buruh, dan Intimidasi massa. Biasanya, komunitas tersebut meminta fasilitas dan advokasi pada Perguruan Tinggi, aktivis mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat atas dasar kebutuhan bersama yang dirasa serta menimpa seluruh anggota komunitas. Dalam hal ini Mas Ony menambahkan harapannya kepada anggota Program Keluarga Harapan (PKH) :

“Kami sebagai pendamping, menginginkan masyarakat yang kami dampingi atau anggota yang dibina memiliki usaha kelompok... atau usaha bersama-lah sebagai penopang lain, selain hanya menunggu bantuan dari luar, sehingga anggota PKH mampu untuk terus melanjutkan hidup..., dan tidak menunggu harta karun yang didatangkan dari langit...”

Ungkapan diatas selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yakni *‘to help people to help themselves’*, pendamping memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai masalah seputar kemiskinannya.

b. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Dalam hal ini Mas Ony mengatakan :

“sebagai pelindung dalam legitimasi hukum, pendamping PKH harus memantau tumbuh kembang anak KSM terutama monitoring dalam sekolahnya..., hal tersebut menghindari peluang terjadinya pekerja anak yang semakin marak..., dan agar si anak mendapat peluang pendidikan yang seharusnya bisa memberikan mereka masa depan yang lebih baik”

Dengan demikian, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, maka setiap individu yang melakukan usaha menuju perbaikan dan pengembangan memerlukan penghargaan untuk menunjukkan bahwa upaya yang dilakukannya dihargai. penghargaan ini diharapkan dapat memicu kinerja yang lebih baik dan memotivasi lingkungannya menghasilkan produktifitas yang sekurang-kurangnya sama dengan yang telah diraihinya.

Dalam melakukan aksi-aksi menuju kehidupan yang lebih manusiawi. UPPKH menganggap bahwa program pemberdayaan tidak bisa dilakukan tanpa adanya strategi dan perencanaan yang jelas, semisal seperti kebersamaan yang dijelaskan diatas. Manakala hasil perencanaan dapat terwujud menyangkut banyak orang, tentunya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ingin diberdayakan. Pada saat masyarakat masih dalam tingkat kesadaran konformis (naif, pasrah, merasa dirinya tidak mampu, idiom banyak anak banyak rejeki). Maka dibutuhkan orang (pendamping) yang dapat memfasilitasi dan memotivasi agar anggota masyarakat (secara individu) dapat meningkatkan kesadarannya.

Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan diantara pendamping dan anggota PKH, maka pendamping pun melakukan kunjungan langsung ke rumah atau ke lokasi usaha anggota secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila dalam pembinaan ternyata anggota menjalankan ketentuan (semisal diskusi/pertemuan) UPPKH dengan baik, maka kunjungan akan dilakukan dengan jarang. Akan tetapi apabila anggota menunjukkan gejala tidak menjalankan kesepakatan yang ditetapkan, maka frekuensi kunjungan pendamping akan ditingkatkan.

Dalam rangka menjalin hubungan baik itu, pendamping minimal satu bulan setelah realisasi program harus mengunjungi anggota PKH. Kunjungan selanjutnya tergantung pada kualitas partisipasi yang dilakukan oleh anggota. Apabila terdapat kecenderungan yang memburuk, maka petugas PKH harus sering mengunjungi anggota tersebut bersama pengurus dan anggota PKH lainnya sebagai perwujudan pelaksanaan tanggung jawab.

Disamping kunjungan yang dilakukan sendiri, pengawas maupun petugas UPPKH dapat melakukan kunjungan ke anggota bersama relawan, aparat kelurahan beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, kunjungan tersebut bertujuan :

- a) Memberikan motivasi kepada anggota agar aktif dalam memanfaatkan bantuan berupa uang melalui Program Keluarga Harapan
- b) Sebagai salah satu sarana monitoring partisipatif yang perlu ditumbuhkan kepada warga

Secara ideal hubungan antara pendamping dan masyarakat di dalam program PKH, adalah inisiator yang datang dari pemerintah itu sendiri (yang diwakili oleh Ketua dan Koordinator UPPKH Kabupaten/Kota). Atas dasar tanggung jawab bersama oleh Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM), Administrator, dan Data Entry/Operator Komputer PKH) dalam melakukan kegiatan untuk mensejahterakan seluruh komponen masyarakat. Pola hubungan ini tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan melainkan bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat terjangkau lainnya. Walau dalam kenyataannya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, inisiator lebih banyak datang dari pendamping dari luar komunitas (outsider) dan jarang datang dari anggota komunitas itu sendiri.

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan semestinya dipahami sebagai transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian. Wujud kemandirian tercermin dari tingkat kepedulian dan partisipasi atau mudarnya ketergantungan kepada pemerintah. Pengertian ini bisa dipahami sebagai sikap mentak dan perilaku rasional, kompetitif dan menolak ketergantungan. Gagalnya program pengentasan kemiskinan

kita karena selama ini program lebih bersifat bantuan sosial. Apakah program pengentasan kemiskinan selama ini hanya sekedar pelestari proyek atau pengaman program. Nuansa itu yang selama ini terjadi, baik di tingkat ide, maupun implementasi di lapangan. Sehingga tak mengherankan kerap timbul kecenderungan untuk sekedar progra terlaksana, dana terbagi habis, dan dana yang terbagi habis termakan masyarakat. Kemandirian masyarakat bukan diindikasikan meningkatnya pendapatan saja, tetapi seberapa jauh mereka menguasai sumber-sumber ekonomi baru. Sehingga pendapatan dapat meningkat dan berkelanjutan, tetapi kepercayaan hidup selanjutnya didapatkan kemandirian sosial ekonomi tersebut wajib dipahami. Di sinilah peran penting pendamping/fasilitator menyelenggarakan dialog dengan masyarakat untuk menggali kebutuhan-kebutuhan nyata, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mendorong masyarakat untuk menemukan spesifikasi masalah yang harus dipecahkan dan mengorganisir mereka untuk mengambil tindakan yang tepat (Belle, 1976).

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita memerlukan suatu strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pada dasarnya mempunyai tiga arah. *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. *Ketiga*, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Pengembangan masyarakat lokal menurut Rothman (sebagaimana diulas Suharto, 2005:42) adalah pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Adapun jika memperhatikan harapan anggota PKH dengan peranan yang dilakukan oleh unit pelaksana (pendamping) Program Keluarga Harapan (PKH) sangat sesuai. Hal terkait dapat dibuktikan dengan peranan (tugas dan aktivitas) pendamping PKH dengan harapan anggota PKH, adapun peranan (tugas/aktivitas yang diharapkan anggota PKH) yang dilaksanakan pendamping PKH melalui program KSM di Kabupaten Jombang tersebut sebagai berikut :

- a) Melakukan persiapan administrasi, yaitu dengan mempersiapkan : pertama, melapor pemerintah setempat. Kedua, mensosialisasikan kepada anggota masyarakat agar mereka tahu kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiga, pembuatan papan nama, papan struktur, data masyarakat yang menjadi anggota, data kepengurusan, buku absen anggota PKH, buku tamu, dan keperluan lainnya.
- b) Edukasi, tekanan utama pada proses perubahan pola pikir (*mind set*) dan perilaku (*behavior*) dari penerima informasi yang terjadi melalui proses sosialisasi yang terus menerus dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- c) Membentuk kelompok bagi masing-masing anggota PKH.
- d) Pembangunan infrastruktur dasar dan pemukiman diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan dan jasa lainnya, serta mewujudkan tata lingkungan pemukiman yang asri bersih dan sehat.

Karena itu, KSM yang dilaksanakan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu usaha berencana untuk memungkinkan partisipasi individual dari masyarakat miskin dan memecahkan berbagai masalah serta adanya kesesuaian antara harapan UPPKH dan anggota masyarakat. Apa yang dilakukan harus merupakan kegiatan yang berupa keseimbangan atau kesesuaian, dimana masyarakat disiapkan oleh pendamping untuk mewujudkan tujuan hidupnya agar lebih memiliki kemandirian. Dengan demikian para pendamping/fasilitator tersebut berperan sebagai agen untuk membentuk masyarakat yang didampingi agar menjadi pribadi yang dapat mencari solusinya sendiri-sendiri.

4.2.2 Kendala atau Hambatan Pendamping dalam Program PKH

Kendala yang dialami pendamping adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data atau formulir pemutakhiran. Adapun kendala yang lain yang dihadapi pendamping adalah peserta yang sesekali masih ditemukan menggadaikan kartu PKH pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau tetangga yang dipinjamkan uangnya oleh pemilik kartu PKH untuk dijadikan jaminan meminjam uang.

Diakui oleh koordinator pendamping PKH, Mas M. Fatoni Safriansyah, dari sekian banyak KSM peserta PKH selalu saja ada yang nakal. Dana PKH disalurkan untuk kepentingan di luar peruntukannya, seperti membayar utang. Terhadap kasus seperti ini pihaknya menegur agar mengganti atau mengadakan lagi dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anaknya atau pemeliharaan kesehatan ibu hamil.

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Mas M. Fatoni Safriansyah sebagai pendamping PKH Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang :

“Ya...nggak menuntut kemungkinan kalau ada yang melakukan kesalahan, ada juga yang nakal... karena hidup memiliki kekeliruan, dan untungnya kekeliruan itu masih bisa ditangani oleh saya... mulai dari masalah susahya mengumpulkan berkas formulir pemutakhiran data dan masih saja ada peserta yang menyalahgunakan kartu PKH sebagai jaminan untuk meminjam uang dengan tetangga atau rentenir sekalipun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ibu yang berinisial (SH) dengan alasan untuk ongkos anak sekolah dan untuk membeli buku LKS... dan saya herankan, ada laporan dan saya pernah memanggil ibu tersebut dikarenakan menggunakan kartu PKH dijadikan taruhan bermain judi oleh ibu-ibu peserta atau suami-suami mereka sendiri... tapi Ahmdulillah belum pernah terjadi di Kecamatan ini”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hanifah salah satu peserta Program PKH dalam beberapa kali proses wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

“Banyak mas... ibu-ibu yang menjual kartu bantuan pemerintah, karena keadaan memaksa sekali mas... jika menunggu bantuan uang bbulan berikutnya, mungkin kami sudah nggak hidup mas... kami gadaikan dengan jaminan uang bantuan bulan depan bisa diganti lagi... pinjamnya ke orang yang punya dan mau meminjamkan uang... ya rentenir itu mas”.

Kebanyakan peserta PKH beranggapan bahwa uang bantuan pemerintah sebagai bantuan yang mereka berhak menggunakan untuk apapun sebagai tanggung jawab pemerintah yang mengolah negara dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kartu bantuan pemerintah melalui Program PKH tersebut akan diambil (ditebus) kembali

ketika pembayaran PKH dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan oleh UPPKH.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pendamping adalah adanya keterlambatan uang kompensasi (honor/tunjangan/pesangon/gaji). Dana kompensasi yang terhambat tersebut menjadikan kekuranganmaksilan pendamping dalam melakukan aktifitas dan kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang menjadi konsentrasi kegiatan di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, kendala ini menjadikan kinerja para pendamping berkurang (malas) dalam hal mencari program kerja yang baru (yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta) bagi para peserta PKH.

Berbagai alasan tentunya didasarkan pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya paling penting didahulukan sehingga PKH ini kurang disambut meriah oleh pemerintah (di daerah-daerah tertentu). Persoalannya bagaimanapun gencarnya sosialisasi oleh pendamping tetap tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah setempat. Dengan demikian, keberhasilan atau ujung tombak Program Keluarga Harapan ada dalam peran pendamping dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tanpa pamrih mau berkorban demi masyarakat dan atas dasar keikhlasan, siap menghadapi situasi dan kondisi lingkungan serta pendekatan lebih intensif, akan memberikan motivasi terhadap KSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak bagi generasi selanjutnya.

4.2.3 Solusi dari Kendala Pendamping Dalam Program PKH

Dari hal di atas, salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya adalah masalah kemiskinan. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial. Dan yang menjadi tujuan utama pemberian bantuan PKH adalah agar anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan pertumbuhan sejak janin, balita sampai bersekolah di SD-SLTP, sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, proses keberfungsian sosial harus dikedepankan sebagai solusi agar persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi. Hingga pada intinya menunjuk pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya.

Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa masyarakat yang menjadi peserta program PKH adalah subjek pembangunan, bahwa masyarakat/peserta memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa masyarakat/peserta memiliki dan/dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya. Adapun solusi dari permasalahan yang ditemui oleh pendamping dalam menangani masalah-masalah diatas yaitu, memberikan peringatan berupa membuat surat pernyataan hitam diatas putih dengan kesepakatan pendamping dan peserta PKH. Dan tidak terlepas dengan pekerja sosial adalah menjadi fasilitator bukan menekan masyarakat yang memiliki masalah melainkan pendekatan secara kekeluargaan sebagaimana arti dari pendamping itu adalah individu atau seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.

Pendamping sosial dalam program PKH melihat bahwa kelompok sasaran atau masyarakat dalam menangani kemiskinan mencakup tiga kelompok miskin secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan status atau profil yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): gelandangan, pengemis, anak

jalanan, suku terasing, jompo telantar, penyandang cacat (fisik, mental, sosial). Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial di atas, maka strategi yang tepat sebagai solusi dalam penanganan kemiskinan harus berfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin (yang menjadi peserta) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi arti, maka intervensi pendamping senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya.

Pentingnya peranan Pemerintah Daerah menjadi ukuran keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejauh mana peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan di lapangan. Sulitnya berkoordinasi dan respon dari instansi terkait begitu lambat dan mengabaikan yang menjadi kendala bagi pendamping haruslah dapat diminimalisasi.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional, dan lintas lembaga sebagai solusi yang tepat. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial. Strategi penanganan kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam kaitannya dengan konteks lingkungan dan situasi sosial

Tabel 4.2
Perbandingan IPM Kecamatan Di Kabupaten Jombang

No	Kecamatan	IPM		
		2009	2010	2011
1	Jombang	76,71	77,10	77,69
2	Gudo	75,28	75,79	76,58
3	Peterongan	74,25	74,42	74,57
4	Jogoroto	72,42	73,03	73,95
5	Sumobito	70,44	71,57	73,29
6	Kesamben	71,34	71,91	72,80
7	Perak	72,93	72,81	72,74
8	Mojowarno	71,31	71,81	72,61
9	Diwek	71,20	71,73	72,55
10	Ngoro	70,73	71,32	72,21
11	Plandaan	69,98	70,90	72,30
12	Bandar Kedungmulyo	70,49	70,96	71,75
13	Tembelang	69,80	70,47	71,48
14	Mojoagung	71,65	71,43	71,14
15	Bareng	69,34	69,92	70,82
16	Kudu	69,57	70,03	70,75
17	Ngusikan	67,26	68,55	70,46
18	Megaluh	67,23	68,41	70,22
19	Ploso	69,58	69,66	69,78
20	Wonosalam	64,65	65,18	66,71

21	Kabuh	65,29	65,81	66,59
	KABUPATEN	72,32	72,86	73,74

Sumber : Tahun 2011 Data Primer diolah Tahun 2009 dan 2010, Laporan IPM Kabupaten Jombang

IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup segala aspek dasar perkembangan manusia baik dari segi sosial, ekonomi, dan dari segi kesehatan. IPM merupakan data fokus dari BPS daerah Kabupaten Jombang sebagai acuan pendataan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan melihat data tabel diatas terdapat kesenjangan antara Kecamatan Jombang dengan Kecamatan Kabuh. Hal ini menandakan masalah utama terbesar dalam bidang pendidikan maupun harapan hidup yang berkait erat dengan bidang kesehatan. Sehingga menitikberatkan kepada peneliti untuk menentukan informan pokok dari pendamping PKH di Kecamatan Kabuh dan juga informan tambahan yang merupakan peserta PKH dari Kecamatan Kabuh pula.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan observasi langsung yang dilakukan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di UPPKH Kabupaten Jombang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

1. Peran pendamping masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan (problem) hidup secara mandiri. Pendamping, juga dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok masyarakat, melainkan mampu pula untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar seperti : melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
2. Harapan masyarakat terhadap PKH ini, yaitu agar selalu berinteraksi (dibimbing dan dibina), melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja guna tercapainya keberlanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin, sehingga masyarakat mampu melepaskan diri dari bantuan orang lain atau pihak luar.
3. Memperhatikan hasil antara harapan dan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh UPPKH, maka program tersebut memiliki kesesuaian antara harapan pemerintah atau pendamping dengan masyarakat setempat yang dijadikan objek pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pendamping PKH melalui RTSM dan program lain yang mendukung berjalan sewajar dan semaksimal mungkin yang dapat dilakukan oleh pendamping PKH. Sehingga anggota masyarakat mampu membangun hidup mereka serta keluarganya secara layak.
4. Kesulitan bagi pendamping untuk mengumpulkan data atau berkas formulir pemutakhiran. Disamping kesulitan lain yang ditemukan di lapangan adalah adanya peserta yang menyalahgunakan kartu bantuan program PKH. Kendala atau kesulitan lain adalah alasan yang didasarkan pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya dianggap paling penting didahulukan sehingga PKH kurang disambut oleh pemerintah (di daerah-daerah tertentu).
5. Keberfungsian sosial menjadi solusi yang harus dihidupkan oleh pendamping PKH dan pemerintah. Dengan demikian, keberfungsian sosial menjadi strategi dan solusi dalam penanganan kemiskinan, yang harus terfokus pada peningkatan kemampuan orang-orang miskin (yang menjadi peserta program PKH). Di lain hal, intervensi pendamping senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Pentingnya peranan Pemerintah Daerah juga menjadi ukuran keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH).

5.2 Saran

Dalam hal ini penulis menyarankan agar peran pendamping PKH terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan dan KSM perlu ditingkatkan, yaitu dengan mempersiapkan pelaksana (pendamping) yang lebih banyak (matang/inisiatif), sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

Melihat harapan warga supaya diadakannya bimbingan dan binaan yang tiada henti, maka anggota masyarakat yang termasuk dalam PKH diharapkan tetap serius, semangat, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program, diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya mendukung.

Terakhir dari penulis, walaupun Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah sesuai dengan keinginan anggota masyarakat, tetap saja agar mereka didorong agar lebih mampu serta memiliki wawasan yang lebih luas (merubah pola pikir) untuk menambah kemandirian anggota masyarakat yang dikenai program. Maka perlu diadakan program-program sosial lainnya.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Pendamping dalam menjalankan tugas, hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban demi masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.

Peranan Pemerintah Daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan selalu memberi motivasi kepada KSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan respon dari instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI).
- Arif, Syaiful. 2000. *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Buku Kerja Pendamping PKH, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI, 2008).
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., *Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*,
- Gillin, J.L dan J.P. Gillin. 1954. *Cultural Sociology*. New York: The Macmillan Company.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja*. Bandung: Rosda Karya.
- Pedoman Umum PKH, *Program Keluarga Harapan*, (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI, 2008).
- Sekilas Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), *Keluarga Sehat, Keluarga Berpendidikan*, (Program Keluarga Harapan, Meraih Keluarga Sejahtera, Unit Pelaksana PKH Pusat UPPKH, 2008-2009).
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Aneka Ilmu.
- Wiranto, T. 1999. *Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah*. Cisarua.
- _____. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.

INTERNET

(Sumber : <http://fasilitator-masyarakat.org/index-artikel>; Peranan Pekerja Sosial Dalam Pendampingan)

(Sumber: http://fasilitator-masyarakat.org/index.php?pg=artikel_detail&id=190)

